

ABSTRAKSI SISTEM SOSIAL DAN BUDAYA SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN

M Ridwan Said Ahmad

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Konsep pembangunan yang selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi (*growth oriented*) ternyata tidak berhasil membangun harkat dan martabat manusia secara hakiki. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan, pembangunan yang semacam itu terutama hanya menghasilkan pertumbuhan material, sehingga tidak mampu menghasilkan lapangan kerja yang mampu memadahi orang miskin. Pembangunan itu justru telah menjerumuskan dunia ke dalam tiga krisis besar yaitu ; kemiskinan, kekerasan, dan kerusakan lingkungan. Contoh konkret adalah bagaimana pembalakan liar dan penggundulan hutan yang kerap kali dilakukan demi sebuah proyek pembangunan. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan menuntut sumber daya yang lebih besar dan tak terbatas. Maka pembangunan seperti itu selalu ditandai dengan perebutan sumber-sumber sehingga mengundang persaingan, konflik, peperangan, dominasi bahkan penindasan. Dalam kondisi seperti ini pengembangan manusia yang beretika dan beradab akan terabaikan. Dengan demikian pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan serta direncanakan secara rapi dari atas (*top down*) harus dikoreksi dengan paradigma pembangunan baru, yang sering disebut dengan pembangunan yang berpusat pada manusia (*People Centered Development*).

Kata kunci: Pembangunan, Budaya, Modal Sosial

Pendahuluan

Sistem sosial budaya merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap masyarakat, dalam pandangan structural fungsional, selalu terdapat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu dimana sebagian besar anggota masyarakat menganggap serta menerimanya sebagai suatu hal yang mutlak benar yang membentuk suatu sistem daripada tindakan-tindakan.

Memandang kehidupan manusia sebagai sebuah sistem, maka setidaknya terdapat empat aspek yang harus diperhatikan di dalam sistem kehidupan manusia tersebut. Keempat aspek tersebut adalah: (1) aspek kehidupan biologis; (2) aspek kehidupan kepribadian atau psikologis; (3) aspek kehidupan kemasyarakatan atau aspek sosial; (4) aspek kehidupan kultural atau aspek budaya (Parsons, 1950). Masing-masing aspek merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar yakni sistem kehidupan manusia.

Keempat subsistem dari sistem kehidupan manusia merupakan sebuah hirarki yang tersusun ke bawah secara berurut: (1) subsistem budaya; (2) subsistem sosial; (3) subsistem kepribadian atau personalitas; (4) subsistem organisme biologik. Masing-masing subsistem pada akhirnya dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang di dalamnya akan terdapat pula sejumlah subsistem yang lebih kecil lagi. Semakin ke atas hirarki siberetik ini semakin kaya informasi, semakin ke bawah semakin kaya energi.

Secara sosiologis, pengertian sistem sosial mengacu pada pemahaman yang menyatukan antara subsistem sosial dengan subsistem budaya. Diasumsikan bahwa realitas kemasyarakatan otomatis menyatu dengan realitas budaya. Bahwa budaya di satu sisi, dan masyarakat pada sisi lainnya, tidak akan bisa dipahami dan dianalisis tanpa mengaitkannya satu sama lain (Sallatang, 1999). Termasuk dalam melihat korelasinya dengan kegiatan pembangunan.

Dilihat dari hirarki sibernetiknya, sistem budaya berfungsi sebagai regulator atau pengarah bagi sistem sosial. Pada sistem budaya, terdapat sejumlah sistem nilai, sistem norma, sistem ideologi ataupun sistem pengetahuan, yang mempengaruhi, mengatur dan mengarahkan tindakan sosial para individu anggota suatu masyarakat. Dengan demikian, apakah suatu masyarakat akan berperilaku “environmentalis-ramah lingkungan” atau berperilaku “eksploitatif-merusak lingkungan”, akan sangat ditentukan oleh sistem budaya yang mereka anut. Tindakan ekonomi dan tindakan sosial anggota suatu masyarakat merupakan hasil konstruksi dari sistem nilai, norma, ideologi dan pengetahuan mereka. Di sini, menjadi sangat penting bagi seorang perencana atau pelaksana pembangunan, untuk memahami karakteristik latar budaya suatu masyarakat. Tindakan masyarakat hanya bisa dipahami dengan memahami latar budayanya.

Namun demikian, harus juga dipahami bahwa sistem nilai, norma, ideologi dan pengetahuan, bukanlah suatu yang sepenuhnya “turun dari langit”. Secara dialektik, sistem nilai, norma, ideologi dan pengetahuan suatu masyarakat merupakan sebuah hasil proses belajar, hasil akumulasi pengalaman, dimana proses belajar dan proses mengalami tersebut berlangsung dalam dunia sosial kehidupan mereka. Dengan demikian, sistem budaya secara sebaliknya, juga merupakan hasil dari konstruksi sistem sosial (Koentowidjoyo, 1987). Artinya, ketika sistem sosial sekian lama berproses berdasarkan acuan sistem budayanya, pada gilirannya nanti sistem budaya tersebut bisa mengalami perubahan gradual sebagai hasil belajar dan hasil pengalaman dan praktek kehidupan yang berlangsung dalam sistem sosial.

Menurut Berger (1988) terdapat tiga tahap hubungan dalam dialektika antara sistem sosial dengan sistem budaya. Pertama, proses dimana individu menginternalisasi apa yang menjadi pranata dalam sistem budayanya. Ini disebut tahap internalisasi. Kedua, proses dimana individu menimbang dan menilai apa yang diinternalisasi dari lingkungan sosial budayanya. Ini disebut tahap obyektivasi. Ketiga, proses dimana individu melakukan tindakan berdasarkan hasil obyektivasi dari apa yang diinternalisasi. Ini disebut tahap eksternalisasi. Siklus ini berulang sedemikian rupa sehingga sistem sosial mengalami dinamika.

Sistem Sosial Budaya Dalam Konteks Pembangunan

Dalam konteks pembangunan, dialektika antara sistem sosial dan sistem budaya menjadi penting untuk dipahami. Pertanyaan yang sering muncul dalam wacana pembangunan adalah: yang mana harus didahulukan, apakah mengubah struktur (sistem sosial) atau mengubah budaya (sistem budaya)? Dengan memahami dialektika sistem sosial dengan sistem budaya, kita akan dapat mensimplifikasi persoalan bahwa yang manapun didahulukan, apakah mengubah struktur atau mengubah kultur, pada akhirnya, dalam sepanjang perjalanan pembangunan, keduanya akan melebur dalam suatu dialektika perubahan.

Modal sosial dalam pembangunan juga dapat dilihat dalam konteks dialektika antara sistem sosial dengan sistem budaya. Hal-hal apa dalam tatanan nilai, norma, simbol dan pengetahuan masyarakat yang fungsional dalam pencapaian tujuan mereka secara bersama dan kordinatif? Hal-hal apa dalam struktur dan interaksi sosial masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan secara terorganisir dan kolektif? Ini adalah poin-poin dalam menganalisis potensi modal sosial dalam pembangunan.

Dampak sosial-budaya dari kegiatan pembangunan juga harus dipahami dalam konteks dialektika demikian. Bahwa, sekali suatu pembangunan berdampak mengubah sistem budaya suatu masyarakat, maka itu berarti ia juga sekaligus mengubah sistem sosialnya. Begitu pula, sekali suatu pembangunan mengubah sistem sosial suatu masyarakat, maka itu berarti ia juga sekaligus mengubah sistem budayanya.

Pola Kebudayaan, Struktur Sosial dan Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses perubahan terencana. Artinya, tanpa dibangunpun, sebuah masyarakat sebenarnya pasti akan berubah, pasti akan berkembang. Hanya saja, perubahan tersebut akan berlangsung tanpa terencana, ia akan berlangsung sesuai dinamika internal dan respon eksternal dari masyarakat itu sendiri. Dengan pembangunan, perubahan suatu masyarakat didesain dalam suatu skenario, dengan arah perubahan yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Secara sosial budaya, dengan demikian, pembangunan dapat diartikan sebagai proses mengubah pola kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat, sesuai kehendak dari pihak yang mendesain pembangunan tersebut. Lazimnya, selama ini, pihak yang mendesain pembangunan adalah negara, atau tepatnya rezim yang berkuasa. Dengan demikian, akan diubah ke arah mana pola kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat, sangat dipengaruhi oleh paradigma dan teori pembangunan apa yang dianut oleh suatu negara.

Di Indonesia, paradigma dan teori pembangunan yang dominan dianut adalah modernisasi. Terutama semasa rezim Orde Baru. Pada rezim pasca Orde Baru, paradigma dependensi telah sedikit diadopsi, tetapi ciri modernisasi tetap signifikan dalam praktek pembangunan. Dengan paradigma dan teori modernisasi, pembangunan diartikan sebagai proses mengubah pola kebudayaan dan struktur sosial dari cirinya yang tradisional sederhana menuju ciri baru yang modern dan kompleks. Modernisasi berdoktrin bahwa kalau masyarakat negara tertinggal ingin mengejar negara maju di Barat dan di Utara, maka lakukanlah modernisasi, tinggalkanlah pola kebudayaan tradisional, tinggalkanlah struktur sosial yang sederhana dan homogen. Pola kebudayaan yang berciri agraris-tradisional-feodalistik-moralistik harus ditransformasi menjadi pola kebudayaan yang industrial-modernis-kapitalistik-rasionalistik. Struktur sosial yang berciri homogen-patronase, harus diubah menjadi struktur sosial terdiferensiasi dan kontraktual.

Dengan berubahnya pola kebudayaan dan struktur sosial, modernisasi juga menghendaki terjadinya diferensiasi lembaga di dalam masyarakat. Pembagian kerja dan spesialisasi keahlian harus berlangsung dalam masyarakat, dan akibatnya adalah lembaga-lembaga juga harus terdiferensiasi. Fungsi-fungsi yang sebelumnya dimonopoli oleh lembaga keluarga/rumah tangga, dengan modernisasi fungsi-fungsi tersebut didistribusi kepada lembaga-lembaga yang semakin terdiferensiasi. Demikianlah, rumah tangga yang pada awalnya sekaligus sebagai unit produksi, dengan modernisasi,

fungsi produksi tersebut diambil oleh pabrik. Bahkan, rumah tangga yang sebelumnya berfungsi sebagai unit konsumsi, oleh modernisasi fungsi tersebut diambil alih oleh restoran/rumah makan. Selanjutnya, lembaga-lembaga yang hadir menggantikan lembaga keluarga tersebut, berdiferensiasi lagi, semakin berkembang biak lagi, seiring dengan munculnya fungsi-fungsi baru, sehingga semakin komplekslah lembaga-lembaga dalam masyarakat. Demikianlah, pembangunan dengan skenario modernisasinya, sebenarnya sangat identik dengan perubahan pada pola kebudayaan, struktur sosial dan diferensiasi kelembagaan, dan pada ujungnya ia sebenarnya identik dengan proses peningkatan kompleksitas masyarakat.

Modal Sosial Dalam Pembangunan

Modal sosial telah semakin disadari urgensinya dalam pembangunan pada dekade terakhir. Menurut Fukuyama (2001), perkembangan ekonomi berkelanjutan pada berbagai negara ternyata berkorelasi dengan kebajikan sosial dalam masyarakatnya. Kebajikan sosial dalam bentuk kejujuran, sifat amanah dan dapat dipercaya menjadi prakondisi bagi berkembangnya tatanan yang mendukung manifestasi etos kerja dari kelompok entrepreneurship dalam menumbuhkan ekonomi.

Terkait dengan proposisi di atas, konsep modal sosial menjadi sesuatu yang relevan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Coleman (1988), yang memfokuskannya pada “sumberdaya yang muncul (*emerging resources*) dari hasil hubungan/interaksi antar orang yang memungkinkan pencapaian tujuan bersama”. Menurut Coleman, faktor-faktor yang mendukung munculnya modal sosial di balik interaksi antar individu adalah oblogasi (*obligations*), ekspektasi (*expectations*) dan saling kepercayaan (*trustworthiness*). Bahwa, modal sosial muncul bila terdapat saling kepercayaan antar individu dalam berinteraksi, sedemikian rupa sehingga satu individu dapat menjamin tindakan individu lainnya untuk tidak keluar dari kepercayaan yang diberikan, dan pada gilirannya dapat mengekspektasi perilaku individu tersebut selanjutnya. Faktor lain adalah bekerjanya saluran informasi (*information channel*) yang menjamin basis yang sama dalam bertindak. Faktor ketiga yang dikemukakan Coleman adalah bekerjanya norma-norma dan sanksi yang efektif. Interaksi antar individu akan menghasilkan modal sosial bila bekerja sebuah norma yang dipatuhi bersama dan terdapat sanksi yang efektif terhadap pelanggaran atas norma tersebut.

Dalam konteks yang lebih operasional dalam pembangunan, Grotaert dan van Bastelaer (2002) mendefinisikan modal sosial sebagai “*institutions, relationships, attitudes, and values that govern interactions among people and contribute to economic and sosial development*” (“kelembagaan-kelembagaan, hubungan-hubungan, perilaku-perilaku dan nilai-nilai yang mengarahkan interaksi diantara individu dan memberi kontribusi dalam perkembangan ekonomi dan sosial”). Artinya, sesuatu di balik interaksi antar individu bernilai modal sosial bila ia berkontribusi dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Berdasarkan definisi ini, modal sosial dianalisis dalam dua bentuk (Uphoff, 2002). Pertama, bentuk modal sosial struktural (*structural sosial capital*), yaitu bentuk relatif obyektif dan dapat diamati dari sebuah struktur sosial seperti jaringan-jaringan (*networks*), ikatan-ikatan (*associations*) dan kelembagaan-kelembagaan (*institutions*) serta petunjuk (*rules*) dan prosedur (*procedure*) di balik bentuk struktural tersebut. Kedua, bentuk modal sosial kognitif (*cognitive sosial capital*), yaitu bentuk relatif subyektif dan elemen tidak terlihat dari interaksi antar individu seperti norma-norma perilaku (*norms*

of behavior), nilai-nilai tersebar (*shared values*), hubungan timbal-balik (*reciprocity*) dan kepercayaan (*trust*). Kedua bentuk ini saling menguatkan satu sama lain, tetapi juga dapat muncul secara sendiri-sendiri.

Keberadaan modal sosial dapat dianalisis dalam tiga level. Pertama, level mikro (*micro level*). Modal sosial ditemukan dalam bentuk jaringan horizontal antar individu dan rumah tangga beserta nilai dan norma yang terikat dengan jaringan tersebut. Contoh: bentuk gotong royong dan arisan dalam masyarakat. Kedua, level menengah (*mezo level*). Bentuk ini mencakup hubungan horizontal dan vertikal antar kelompok (dengan kata lain level dimana individu dan masyarakat berada sebagai satu kesatuan). Contoh: pengelompokan regional dari organisasi lokal, misalnya kasus UMSS di Filipina. Ketiga, level makro (*macro level*). Bentuk ini mencakup kelembagaan dan lingkungan politik yang berfungsi sebagai latar (*backdrop*) dari aktivitas ekonomi dan sosial yang nyata serta kualitas dari pengaturan pemerintahan (*governance arrangements*). Misalnya: supremasi hukum, sistem peradilan, atau kualitas kekuatan kontrak yang semuanya merupakan determinan dalam pertumbuhan ekonomi.

Terdapat empat perspektif/cara pandang dalam menganalisis potensi modal sosial dalam pembangunan. Perspektif komunitarian (*communitarian perspective*) mendeskripsikan modal sosial sebagai kelompok dan organisasi lokal dengan fokus pada modal sosial produktif, misalnya dalam fungsinya untuk menanggulangi kemiskinan. Perspektif jaringan (*networks view*) menganalisis modal sosial dengan fokus hubungan-hubungan antara dan di dalam asosiasi horizontal dan vertikal. Pandangan ini menjembatani dikotomi intra dan antar ikatan komunitas. Manfaat modal sosial dilihat pada keanggotaan dari komunitas yang dengan itu menekan perilaku non kompromis anggota. Perspektif kelembagaan (*institutional view*) menempatkan lingkungan politik, hukum dan kelembagaan sebagai determinan pokok dari kekuatan jaringan komunitas. Perspektif sinergi (*synergy view*) mengintegrasikan fokus mikro, meso dan makro dari perspektif jaringan dan kelembagaan, yang pada gilirannya terfokus pada saling hubungan antara dan didalam pemerintahan dan masyarakat sipil.

Kesimpulan

Kehidupan masyarakat tidak pernah terlepas dari sistem sosial dan budaya di mana masyarakat tersebut bertempat tinggal yang sekian lama hidup bersama dan bekerjasama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap hidup mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang mereka rumuskan dengan jelas pula untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan bersama. Berangkat dari pembahasan di atas ketika berbicara dalam kerangka pembangunan dalam kaitannya dengan sistem sosial dan budaya maka pembangunan dapat di maknai sebagai proses mengubah pola kebudayaan dan struktur sosial suatu masyarakat sesuai dengan tujuan atau arah pembangunan yang diinginkan, di mana sistem sosial dan sistem budaya dalam sepanjang perjalanan pembangunan akan melebur dalam suatu dialektika perubahan. Begitu pula dengan modal sosial yang menjadi daya pendukung dalam mendorong pembangunan dapat di lihat dalam konteks dialektika antara sistem sosial dengan sistem budaya. Dengan demikian memahami dinamika sistem sosial dan budaya di suatu masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena besar kemungkinan bahwa proses pembangunan akan menggeser nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang ada atau berarti pula proses dari pembaharuan sistem sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, J.C., 1999. "*Social Capital in the Creation of Human Capital*", Oxford Press
- Koentowidjoyo, 1987. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Parson Talcott. 1950. *The Structure and Social System*. New York Press
- Poloma, Margaret. 2000. "Sosiologi Kontemporer". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ranjabar, Jacobus. 2006. "Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar". Bogor: Ghalia Indonesia
- Sallatang, Arifin. 1982. "Pinggawa – Sawi; Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil". Makassar.
- , 1999. *Masyarakat, Budaya dan Lingkungan (Makalah TMPP-D)*. Makassar: PSKMP Unhas
- Serageldin (Eds.), *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington: The World Bank.